

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan Keuangan merupakan sarana utama melalui mana informasi keuangan perusahaan di komunikasikan kepada pihak luar perusahaan. Laporan keuangan ini memberi "suatu sejarah yang berkesinambungan yang di kuantifisir dalam satuan uang berkenaan dengan sumber daya ekonomi dan kewajiban dari suatu perusahaan bisnis dan aktivitas ekonomi yang mengubah sumberdaya dan kewajiban ini. Laporan keuangan yang paling sering disajikan adalah 1) Neraca; 2) Perhitungan Laba/Rugi; 3) Laporan Arus Kas; 4) Laporan Perubahan Ekuitas pemilik / pemegang saham (Kciso, Weygandt dan Warfield, 2002).

Harapannya, dengan membaca Laporan Keuangan tersebut, investor saat ini maupun yang potensial, akan mengambil keputusan investasinya. Hal ini disebabkan karena investor saat ini dan potensial berkeyakinan bahwa manajemen perusahaan pasti bertindak profesional dalam mengelola perusahaan, dan setiap keputusan yang diambil oleh manajemen tidak semata-mata untuk kepentingan pertumbuhan (nilai perusahaan).

Namun yang sering terjadi adalah keputusan yang diambil semata-mata untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga untuk kepentingan para eksekutif. Bahkan dalam banyak kasus keputusan dan tindakan yang diambil hanya menguntungkan eksekutif dan merugikan perusahaan, yang sudah tentu akan merugikan para pemegang saham. Artinya manajemen mempunyai agenda (kepentingan) yang berbeda dengan kepentingan pemilik. Penggunaan Creative

accounting, bussines failure, limited roles of auditor, tidak adanya hubungan yang jelas antara system kompensasi dengan kinerja, penekanan pada kinerja (laba akuntansi) jangka pendek yang mengorbankan long-term economic profit, (Keasy and Wright, 1997 dalam Riyanto 2005).

Permasalahan diatas menurut teori keagenan (agency theory), disebabkan karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan manajemen perusahaan yang mana karena pemisahan tersebut menyebabkan manajemen lebih paham dan memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan pemilik (asymetry information) serta adanya kecenderungan dari manajer untuk mencari keuntungan pribadi (moral hazard) dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Hal itu terjadi karena walaupun manajemen perusahaan memperoleh kompensasi dari pekerjaannya, namun pada kenyataannya perubahan kemakmuran manager sangat kecil dibandingkan perubahan kemakmuran pemilik / pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976).

Untuk memperkecil permasalahan yang ada antara pemilik dan manajemen perusahaan, maka muncul konsep tata kelola perusahaan yang baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Corporate Governance*. Diharapkan dengan diterapkannya tata kelola yang baik (good corporate governance) maka akan mengendalikan manajer, dengan cara memperkecil kesenjangan informasi antara manajemen dan pemilik. Jadi *good corporate governance* merupakan suatu tata kelola perusahaan yang berusaha untuk melindungi serta para stake holders perusahaan, Husnan (2001).

Menurut Naim (2000), penerapan good corporate governance (selanjutnya

tingkat GCG) merupakan sistem yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (stake holders) yang termasuk dalam stake holders adalah para pemegang saham (share holder), Kreditur (lenders), Karyawan (employees), manajemen (executives), Pemerintah (government), Pelanggan (customers) dan Stake holders yang lain.

Hal ini sejalan dengan Riyanto (2005) yang menyatakan bahwa penerapan GCG dalam suatu perusahaan akan memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, karena dengan diterapkannya GCG akan meningkatkan pengendalian perilaku para eksekutif puncak perusahaan. Dalam konsep GCG komitmen, loyalitas dan motivasi manajemen khususnya manajemen puncak akan dikendalikan sehingga orientasinya hanya semata-mata kepada perusahaan yang dikelolanya dan bukannya untuk kepentingan para eksekutif perusahaan yang tidak jarang menguntungkan perusahaan.

Munurut Sukamulja (2004) dengan diterapkannya GCG, maka pemegang saham dan investor akan memperoleh jaminan bahwa manajemen akan terus berupaya agar kinerja perusahaan terus meningkat, yang pada akhirnya memberikan tingkat pengembalian yang memadai atas dana yang ditanamkan ke perusahaan, karena pasar secara keseluruhan memberikan persepsi yang baik terhadap perusahaan. Sedangkan bagi authority boards, penerapan GCG akan meningkatkan efisiensi dan kredibilitas pasar modal sebagai salah satu alternatif investasi, ke kegiatan ekonomi (bisnis) yang produktif.

Menurut Tunggal dan tunggal (2002); Sukamulja (2004), serta Riyanto (2005), dalam GCG terdapat 4 dimensi yang diharapkan akan tercapai. Keempat

dimensi tersebut adalah 1) Transparansi, 2) Akuntabilitas (accountability), 3) Kewajaran (fairness) serta, 4) Tanggung jawab (responsibility). Adapun harapan yang akan dilihat dari 4 dimensi tersebut adalah sebagai berikut : 1) Transparansi (transparancy), dengan diterapkannya GCG maka manajemen akan memastikan adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat terhadap semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, mencakup situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan. 2) Akuntabilitas (accountability) yaitu dengan diterapkannya GCG maka memastikan adanya pedoman kontrol yang baik, pelaksanaan pengontrolan (monitor) yang efektif maupun adanya mekanisme yang jelas dalam perekrutan dewan pengawas, sehingga mampu memberikan pengawasan yang baik atas kerja perusahaan. Dalam GCG accountability biasanya dilakukan oleh Dewan Komisaris (board of directoris). 3) Kewajaran (fairness), adalah adanya kepastian berkaitan dengan sistem yang dibangun harus seimbang untuk semua pihak didalam perusahaan untuk sekarang maupun masa yang akan datang. Sistem yang dibangun harus dapat mengakomodasi semua kelompok dalam perusahaan harus diakomodasi dan dihormati atas dasar konsiderasi yang sama, sedangkan 4) Tanggung jawab (responsibility), yaitu diharapkan manajemen bertanggung jawab atas semua perilakunya dalam menjalankan perusahaan, adanya tindakan korektif dan berani bertindak *misangent*, sehingga manajemen berani memastikan bahwa perusahaan berada pada arah yang benar sesuai dengan amanat Rapat Umum Pemegang Saham.

Beberapa hasil penemuan menunjukkan bahwa hasil yang mendukung pendapat diatas. Penelitian Husnan (2001) menghasilkan kesimpulan bahwa

perusahaan-perusahaan yang listing di BEJ yang menerapkan GCG, mempunyai nilai return on capital (ROC) juga memiliki Return On Equity dan Economic Value Added (EVA). Selain itu Keapper dan Love (2002), menyimpulkan bahwa ada tingkat korelasi yang tinggi antara indikator mekanisme penerapan GCG dengan kinerja dan market volutation. Artinya, dengan diterapkannya GCG dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Drobetz, (2003) dalam Ndaruning Putri (2005) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat corporate governance yang tinggi dapat menghasilkan kinerja yang baik.

Selain itu, beberapa penelitian lain lebih menitik beratkan pada suatu masalah komponen dari *corporate governance* misalkan Shivdansi dalam Darnawati dkk (2005) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji apakah perbedaan struktur dewan direksi (dewan direksi dan komisaris untuk Indonesia) dan kepemilikan ekuitas memiliki kontribusi terhadap kemungkinan perusahaan untuk diakuisisi (hostile takeover) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik dewan direksi dan struktur kepemilikan ekuitas merupakan determinan yang signifikan terhadap kemungkinan suatu perusahaan menjadi target sasaran target akuisisi. Sedangkan Dalton dkk (1999) dalam Darnawati dkk (2005) menemukan adanya hubungan sistematis antara ukuran dewan direksi kinerja perusahaan.

Akan tetapi beberapa penelitian juga menemukan hasil yang berseberangan. Artinya penelitian-penelitian tersebut tidak menemukan keterkaitan antara GCG dengan kinerja perusahaan. Jadi menurut hasil penelitian tersebut, ada atau tidaknya sebuah perusahaan menerapkan GCG, tidak akan

mempengaruhi terhadap kinerja keuangan perusahaan tersebut. Adapun penelitian tersebut antara lain misalkan dilakukan oleh daily dkk (1998) dan hasil survey (CBR, Deloitte dan Tauche (1996) sebagaimana dikutip oleh Kakabadse, dkk (2001) dalam Darmawati dkk (2005), menemukan bahwa tidak ada hubungan antara penerapan GCG dengan kinerja perusahaan. Bahkan menurut Gompers, dkk (2005), hubungan antara indeks GCG dan kinerja perusahaan hanya berlaku untuk jangka panjang dan tidak berlaku untuk jangka pendek. Selain itu penelitian oleh Damortz dan Lehn (1985) yang dikutip oleh Xu dan Wang (1999) menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara konsentrasi kepemilikan dan tingkat laba akuntansi untuk 511 perusahaan terbesar di US. Beiner et al (2003) menemukan bahwa ada hubungan negatif antara struktur kepemilikan dengan kinerja, karena investor yang memiliki jumlah hak suara besar cenderung lebih menaruh perhatian kepada kinerja perusahaan yang rendah. Hal ini disebabkan karena pemegang saham yang jumlahnya besar (large shareholder) menggunakan kekuatan suara mereka untuk memperbaiki posisi mereka sendiri.

Dari perbedaan hasil penelitian seperti tersebut diatas, maka pertanyaan yang patut diajukan adalah "apakah penerapan GCG yang benar dalam perusahaan khususnya perusahaan publik tidak mempengaruhi kinerja perusahaan?" Padahal secara teoritis, harusnya penerapan GCG akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Menurut Kakabadse, dkk (2001) dalam Darmawati (2005) perbedaan hasil penelitian tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1) perspektif teoritis yang digunakan 2) metodologi penelitian 3) pengukuran kinerja dan 4) perbedaan

banding atas keterlibatan dewan dalam pengambilan keputusan.

Pada penelitian ini, peneliti mencoba menguji kembali pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan. Adapun perbedaan-perbedaan yang ada dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

Dua dari 4 dimensi dalam GCG, adalah adanya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berkaitan dengan pengungkapan (disclosure) informasi keuangan oleh perusahaan. Kelengkapan pengungkapan akan memberikan gambaran mengenai kondisi perusahaan. Informasi keuangan mencerminkan kinerja perusahaan, oleh karenanya segala bentuk informasi keuangan perusahaan akan menjadi perhatian investor. Kebutuhan investor akan informasi keuangan akan menuntut perusahaan untuk menampilkan informasi keuangan yang baik, dengan harapan pasar akan bereaksi baik sehingga diharapkan akan membantu meningkatkan kinerja perusahaan.

Akuntabilitas dalam GCG berkaitan dengan pertanggungjawaban manajemen, bahwa apa yang telah dihasilkan oleh manajemen dapat dipertanggungjawabkan kepada investor. Akuntabilitas merupakan salah satu cara untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dilimpahkan kepada manajemen. Dengan adanya akuntabilitas diharapkan tujuan-tujuan perusahaan akan tercapai, dengan demikian penerapan good corporate governance diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Bentuk akuntabilitas manajemen adalah melalui penyajian laporan keuangan. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan akuntabilitas adalah kemungkinan manajemen melakukan manipulasi karena adanya asimetri

manipulasi, dalam hal ini melalui *earning management*. Manipulasi kinerja yang diupayakan dengan beberapa cara merupakan suatu upaya manajemen untuk mempengaruhi suatu keputusan tertentu untuk mengubah laporan dengan tujuan untuk menyetatkan pemegang saham yang ingin mengetahui kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka akuntansi yang dilaporkannya (Healy dan Wahlen, 1998; Du Charme et al., 2000, dalam Hastuti, 2005).

Alasan untuk tidak memasukan pengukuran keadilan (*fairness*) adalah karena keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, yang tidak dapat dinilai secara pasti. Demikian pula dengan tanggung jawab perusahaan (*responsibility*).

Permasalahan lain yang muncul berkaitan dengan GCG adalah terjadinya perbedaan kepentingan antara dua kelompok pemilik perusahaan, yaitu *controlling shareholders* dan *minority shareholders*. Seringkali *controlling shareholders* mengendalikan keputusan manajemen yang merugikan *minority shareholders* (Hastuti, 2005). Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi oleh institusi akan memudahkan pengendalian sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan. Mamduh (2003) dalam Imanda (2006) menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional, maka akan semakin meningkatkan pengawasan pihak eksternal terhadap perusahaan. Adanya pengawasan dari pihak eksternal diharapkan akan memacu manajemen untuk berkinerja lebih baik dalam menjalankan perusahaan sehingga berdampak pada kinerja perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Claessens et al (2000) dalam Arifatul (2007) yang menyatakan bahwa lebih dari 2/3 perusahaan publik berada dalam

kepemilikan keluarga, dan hanya 0,6% yang dimiliki secara luas oleh publik. Keluarga-keluarga yang demikian mendapatkan anggota-anggota keluarganya dalam level top manajemen. Menurut Wang (2005) dalam Arifatul (2007) keadaan demikian menyebabkan perusahaan memiliki corporate governance yang buruk tentunya akan berdampak pada penurunan kinerja perusahaan.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Hastuti (2005). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sampel dan tahun pengamatan. Pada penelitian yang dilakukan Hastuti (2005) sampel yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam LQ 45, sedangkan dalam penelitian ini penulis mengambil perusahaan-perusahaan manufaktur. Pemilihan perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur menurut Gantjowati (1998) dalam Tarjo (2005) cukup sensitif terhadap setiap kejadian. Hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur selain merupakan populasi terbesar dari seluruh kelompok perusahaan yang terdaftar pada BEJ, yang membutuhkan modal yang besar dalam menjalankan usahanya, sehingga saham yang diperdagangkan juga besar. Selain itu, rata-rata perusahaan manufaktur di Indonesia memiliki komponen bahan baku yang diperoleh dari import, sehingga sesuai dengan perubahan rupiah. Peneliti memilih tiga tahun pengamatan yaitu tahun 2006, 2007 dan 2008.

Adanya kekhususan tahun 2006, 2007 dan 2008, menyebabkan peneliti tertarik untuk menguji kembali model penelitian yang telah dilakukan oleh Hastuti (2005) sehingga penelitian ini berjudul **“Pengaruh Hubungan Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan dengan Kinerja Perusahaan”**.

3.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang akan dikaji penelitian ini adalah :

- 1) Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan *good corporate governance* yang diproksikan dengan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan tahunan dengan kinerja perusahaan?
- 2) Apakah terdapat hubungan antara *good corporate governance* yang diproksikan dengan *earnings management* dengan kinerja perusahaan?
- 3) Apakah terdapat hubungan antara struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan?

3.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk melihat apakah terdapat hubungan antara GCG yang diproksikan oleh pengungkapan laporan keuangan dan *earnings management* dengan kinerja perusahaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat adanya hubungan antara struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan.

3.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan yang berkaitan dengan permasalahan *good corporate governance*, stuktur kepemilikan dan kinerja perusahaan.